



# Hari Pahlawan Disambut Demo

Pontianak, BERKAT.

Peringatan hari Pahlawan disambut aksi demonstrasi ratusan massa yang mendatangi kantor Gubernur dan DPRD Kalimantan Barat, Kamis (10/11). Pengunjuk rasa terdiri dua kelompok massa dan menyampaikan aspirasi berbeda.

Massa pengunjuk rasa terdiri dari eks korban kerusuhan etnik 1996/1997 dan Solidaritas Mahasiswa Pengembalian Aspirasi Rakyat. Jika masyarakat eks korban kerusuhan menuntut pembayaran jatah hidup oleh Pemprov, berbeda dengan halnya dengan Solmadapar. Mereka lebih menyoroti kinerja pemerintah daerah. Terutama masalah temuan BPK-RI Perwakilan Kalbar dan pengisian SKPD.

Kelompok massa Solmadapar secara tegas menyatakan Pemprov Kalbar kurang



Ratusan pengunjuk rasa mendatangi kantor Gubernur menyampaikan aspirasi bertepatan peringatan hari Pahlawan.

FOTO DELI

berpihak dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tudingan tersebut diberikan karena dua terpidana kasus baju hansip tetap dipertahankan sebagai pimpinan SKPD.

"Gubernur Kalbar sebagai pemegang kekuasaan seharusnya ikut menjunjung tinggi hukum. Alih-alih mempercepat proses penegakan hukum, memecat mereka yang terpidana saja tidak berani. Menjadi sebuah pertanyaan besar yang

harus ditransparansikan," kata Anton, koordinator lapangan.

Dia menganggap pemprov seakan tidak mempunyai itikad baik menyikapi hasil audit BPK-RI Kalbar. Terhadap temuan aset dan anggaran yang terindikasi mengalami kebocoran hingga mencapai Rp 156 miliar.

Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah, lanjut Anton, tampak sibuk pada pencitraan diri ketimbang membenahi bobroknya ruang lingkup kerja SKPD yang merusak sisi

LANJUTAN BACA HAL 11

## Hari Pahlawan Disambut Demo .....dari Hal 1

moral, intelektualitas dan jauh dari sikap keadilan.

Padaahal, kata dia, menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi. Rumusan yang tertuang dalam pasal 33 UU No 31/1990 tentang UU tindak pidana korupsi. Faktanya, Gubernur masih mempertahankan terpidana kasus pengadaan baju hansip beserta atributnya.

Karena itu pendemo menganggap semangat hari pahlawan sudah ternodai perilaku pejabat yang tidak berpihak kepada rakyat. Sementara pada sisi lain rakyat terus menangis dengan banyaknya penindasan yang tidak sesuai semangat perjuangan pahlawan.

Sementara itu, massa eks korban kerusuhan 1996/1997 menuntut Gubernur segera membayarkan biaya tunjangan hidup seperti yang pemerintah

janjikan. Apalagi hak mereka sudah diperkuat keputusan pengadilan, Kamis (2/11). Setelah memenangkan gugatan secara perdata.

Perwakilan pengunjuk rasa, H Masduki, sempat diterima Satpol PP Pemprov. Hasilnya, eks korban kerusuhan diminta melengkapi berkas. Untuk diserahkan ke Pemprov. Meski belum ada titik kejelasan tentang dana yang dituntunkan pengunjuk rasa.

Setelah puas berorasi dengan tuntutan yang disuarakan, massa Solmadapar maupun eks pengungsi yang berdemo membubarkan diri secara tertib. Namun, Solmadapar melanjutkan aksi ke gedung DPRD Provinsi Kalbar. Mereka kembali menyampaikan aspirasi serta meminta untuk bertemu Wakil Gubernur Kalbar Cristiandy Sanjaya yang sedang melaksanakan rapat dengan anggota dewan. (del)